

Implementasi Pembelajaran Sistem Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa SMA Negeri 12 Makassar

*Implementation of Online Learning System During the Covid-19 Pandemic for Students of
SMA Negeri 12 Makassar*

Fify Aulia*, Nining Haslinda, Natsir Tompo

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
email: fifyauliaa@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui : 30 Januari 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan faktor yang mempengaruhi program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, serta analisis dokumen melalui penelitian di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan SMA Negeri 12 Makassar. Model analisis yang digunakan yaitu teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keberhasilan implementasi kebijakan dalam penerapannya siswa mempunyai inisiatif untuk tetap mendukung kegiatan belajar daring, namun cukup berat untuk menyesuaikan aturan daring ini, dikarenakan proses belajar secara daring muncul rasa malas terhadap dirinya. Dapat di generalisasi kalau ada efek yang membuat menurunnya pembelajaran siswa bukan dikarenakan sistem belajar daring akan tetapi lebih kepada perangkat pendukung pengaplikasian sistem belajar daring mulai dari, jaringan internet, smart android bagi guru dan siswa serta juknis penggunaan aplikasi belajar online yang sedikit saja yang paham; (2) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring, ditunjukkan konsistensi disdik sulsel dalam mendukung pelaksanaan sistem belajar daring serta para guru dan siswa SMA Negeri 12 Makassar. Responsivitas atau daya tanggap terhadap implementasi kebijakan penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat. Kemudian SMA Negeri 12 Makassar dalam pengeimplementasiannya tidak terlepas dari aturan pusat namun tetap mempertimbangkan antara regulasi-regulasi yang ada dan tingkat ekonomi peserta didik.

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran, Daring, Covid-19, Siswa, Makassar

Abstract

This study aims to determine the success of the policy implementation of factors that affect the online system learning program during the Covid-19 pandemic for students of SMA Negeri 12 Makassar. Data were collected by conducting observations, interviews, and document analysis through research at the South Sulawesi Provincial Education Office and SMA Negeri 12 Makassar. The analytical model used is the analytical technique according to Miles and Huberman which consists of three flow of activities that occur simultaneously, including data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of the study show that: (1) the successful implementation of the policy in its application, students have the initiative to continue to support online learning activities, but it is quite difficult to adjust these online rules, because the online learning process appears lazy towards themselves. It can be generalized if there is an effect that makes student learning decline not due to the online learning system but rather to supporting devices for the application of online learning systems ranging from internet networks, smart androids for teachers and students as well as technical guidelines for the use of online learning applications that few understand; (2) the factors that influence the implementation of the

online system learning program policy, shown by the consistency of the South Sulawesi Education Office in supporting the implementation of the online learning system as well as the teachers and students of SMA Negeri 12 Makassar. Responsiveness or responsiveness to the implementation of policies on the application of the online system learning process during the Covid-19 pandemic, can be seen in the government's concern for the needs and interests of the community in adjusting the directions from the central government. Then SMA Negeri 12 Makassar in its implementation cannot be separated from the central rules but still considers the existing regulations and the economic level of students.

Keywords: *Implementation, Learning, Online, Covid-19, Students, Makassar*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada persoalan munculnya dan menyebarnya wabah virus corona, yang oleh WHO (*World Health Organization*) disebut sebagai Covid-19. Wabah yang muncul di kota Wuhan ini, pertama kali dilaporkan oleh China kepada WHO pada tanggal 31 Desember 2019. CoV (*Coronaviruses*) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit dari flu hingga penyakit lebih berat seperti MERSCoV (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS-CoV (*Severe Acute Respiratory Syndrome*), yang merupakan jenis penyakit baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2021 teridentifikasi adanya pasien positif Covid-19 berjumlah 3.854.354 orang, kemudian menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 117.588 kasus kematian. Oleh karena itu, semua negara harus siap menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi meliputi program karantina, termasuk pengawasan aktif, deteksi dini, isolasi dan manajemen kasus, pelacakan kontak dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19. Peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Pemerintah dalam menetapkan PSBB berupa “peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan” harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Dengan penetapan PSBB di Indonesia tersebut dengan salah satunya berupa peliburan sekolah, namun harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, maka pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring (dalam jaringan) atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Setelah PSBB, kemudian ada kebijakan terbaru yang diterapkan di Indonesia, yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dimana sebelumnya pemerintah mengganti penggunaan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) di kawasan Jawa-Bali menjadi PPKM Level 4. Hal tersebut tertuang di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 23 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa Bali. Tingkatan level pada PPKM, yakni level 4, level 3, level 2, di wilayah Jawa dan Bali diatur dalam INMENDAGRI No. 27 Tahun 2021. Sementara PPKM Level 4 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku di atur melalui IMENDAGRI No. 28 Tahun 2021. Tidak ada perbedaan di dalam aturan level 4, level 3, dan level 2 karena setiap aturan pembatasan yang berlaku pada PPKM level 4, berlaku pula pada PPKM level 3 dan level 2. Misalnya, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, kademik, tempat Pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online). Pemerintah Kota Makassar,

Sulawesi Selatan, kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 selama dua pekan, mulai 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021.

Perpanjangan PPKM level 4 yang di terapkan oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hal ini sesuai dengan Surat keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 443.01/400/S.Edar/Kesbangpol/VIII/2021 yang ditandatangani per 10 Agustus 2021. Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 saat ini maka pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021/2022 bersifat dinamis mengacu pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah, dan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut diutarakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Menurut (Syarifuddin, 2020), bahwa pembelajaran daring dilakukan melalui berbagai aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran seperti *google classroom*, *whatsapp group*, *zoom* dan lain sebagainya. Pembelajaran daring ini akan membentuk pembelajaran yang menajadikan siswa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Selama pembelajaran online diberlakukan untuk semua lembaga pendidikan, banyak yang mengalami perubahan, terutama pada siswa jenjang SMA. Siswa SMA adalah individu yang memasuki masa remaja, di mana masa remaja sangat rentan mengalami permasalahan karena mengalami perubahan baru dalam dirinya. Dalam pembelajaran daring tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perlu adanya penelitian mengenai Implementasi Pembelajaran Sistem Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa SMA Negeri 12 Makassar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar, serta faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19.

Secara etimologis implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh (Solichin Abdul Wahab 2004) (Webster dalam Wahab 2004) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* dalam (Wahab 2001) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut (Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* dalam Harsono, 2002) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi kebijakan

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. Menurut (Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno, 2021) mengungkapkan bahwa implementasi memiliki arti apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau satu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, para ahli juga memaparkan pendapatnya, antara lain: Model (George C Edwards III, 2011) Model implementasi kebijakan ini berperspektif *top down*. (Edward III dalam Subarsono, 2011) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan.

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh (Edward III dalam Agustino, 2006) adalah pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul skripsi “Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas II MI Unggulan Miftahul Huda Tamang Cepogo Boyolali” dengan Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas II A kurang efektif. 2) Kelebihan pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas II A adalah waktu belajar fleksibel, siswa lebih dekat dengan orang tua, siswa tidak bergantung pada guru dan melatih kepercayaan diri siswa. Sedangkan kekurangan pelaksanaan pembelajaran daring adalah

guru tidak dapat berinteraksi langsung dengan siswa, serta tidak stabilnya jaringan internet.

3) Bidang yang diperbaiki agar pembelajaran daring berjalan lebih baik adalah penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik seperti video animasi, sslide show power point. Sedangkan dengan penelitian yang terkait yang penulis peroleh hasil bahwa implementasi program pembelajaran sistem daring di masa pandemi

- 1) Penerapan program pembelajaran sistem daring sangat berdampak kepada siswanya . tetapi siswa teatp meiliki inisiatif untuk tetap mengikuti kebijakan pembelajran daring agar pembelajran tidak tertinggal, walau media pembelajaran dan waktu terbatas.
- 2) faktor yang mempengaruhi program pembelajaran ssitem daring dalam hal ini komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi saling berkaitan responsivitas atau daya tanggap terhadap implementasi kebijakan penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat. Kemudian SMA Negeri 12 Makasssar dalam pengeimplementasiannya tidak terlepas dari aturan pusat namun tetap mempertimbangkan antara regulasi-regulasi yang ada dan tingkat ekonomi peserta didik. Guru mampu memperoleh penerapan pembelaajran sistem daring di masa pandemi covid-19 dengan pemahaman materi yang bisa siswa pahami dengan baik. Walau tidak mampu untuk maksimal setidaknya struktur organisasi berjalan dengan semestinya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan agar mampu mengemukakan informasi kualitatif sehingga nantinya lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendiskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2009)

Terkait data penelitian digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap informan dan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya untuk informan sebagai sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan dengan Sedangkan data sekunder yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (Interview) dan observasi pustaka (Literaur Review). Dalam hal ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut. Dari hasil penelitian, peneliti difokuskan pada

- 1) Bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar.
- 2) Apa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat di Kota Makassar, diantaranya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan dan SMA Negeri 12 Makassar. Kedua tempat ini merupakan sumber data dan tindak lanjut dari fokus penelitian dalam pengumpulan data. Informan yang peneliti pilih telah mewakili bisa menjawab persoalan yang berkaitan dengan rumusan masalah hingga titik jenuh. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 15 orang. Dengan kriteria terdiri kepala sub bagian program dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan

Kepala Bidang Pembinaan SMA dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan kriteria kedua dari SMA Negeri 12 Makassar terdiri dari Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Guru-Guru dan siswa-siswi perwakilan dari tingkatan kelas SMA Negeri 12 Makassar. Model analisis yang digunakan yaitu teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa penggambaran deskriptif tentang Implementasi Pembelajaran Sistem Daring di Masa Pandemi Covid – 19 Pada Siswa SMA Negeri 12 Makassar, serta menjelaskan terkait hal-hal mulai dari, bagaimana implementasi program belajar daring, dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasinya. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan menggunakan analisis kesesuaian proses, ketercapaian yakni dampak atau efek dan tingkat perubahan dalam penerapan kebijakan belajar online.

Menurut (Grindle, 1980) bahwa Keberhasilan suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dua hal yakni Kesesuaian Proses dan Ketercapaian, dengan rincian yaitu:

1. Kesesuaian Proses

Menurut (Grindle 1980), bahwa kesesuaian proses dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara dengan Informan, yakni bapak M. Yusri Gasali selaku Kepala Sub Bagian Program, pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkait kesesuaian proses penerapan pembelajaran sistem daring di masa pandemic Covid-19;

Kalau kita design nya di sini, Kita lihat dulu aturan dari permendikbud, dari permendikbud itu kita buatlah Pergub dan Juknisnya. Jadi, Susunannya itu dari Permendagri kemudian dibuatlah dalam bentuk Pergub, pergub itu dibuatlah SOP nya. Bagaimana pembelajaran di masa Covid-19. Jadi kita lihat juga tidak semata-merta bahwa begini aturannya pusat, harus daring semua, tapi kita harus melihat juga dari segi geografis sekolah. Kalau general ini kan, kita tidak melihat dari satu sekolah makassar. Makassar itu okelah, jaringannya oke, tapi kalau kita di Pemprov harus melihat juga dari geografis ketiga daerah ini. Kita bagi tiga, bagi tiga itu ada dikatakan : Best Network, ada Bat Network dan Remot Area . Kalau Best Network itu jaringannya bagus dia 4G, 5G Bagus jaringannya, oke kita bisa sistem virtual/daring, kalau Bat Network itu jaringannya cuman 3G, yang bappingnya lama, yang berada di ibu kota kecamatan yang kalau kita buka you tube bappingnya lama, buka zoom terkadang ngebab ki itu video tapi suara jalan, sering kita hadapi itu kan, sedangkan kita di Makassar biasa dapat jaringan yang begitu apalagi yang di Bat Network. Kalau Remote Area itu memang rata-rata pembelajaran jarang tatap muka, tapi masih menggunakan sistem WA. Kalau Bat Network itu 50% WA, dan google classroom. Wawancara yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Program, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (28 Juni 2021).

Dari wawancara tersebut, peneliti simpulkan bahwa aturan regulasi yang di buat oleh pusat itu kemudian di telaah kembali dan setelah itu pihak dinas membuat regulasi berupa Pergub beserta juknis tata cara mengaplikasikan regulasi yang sudah dibuat tadi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, diukur oleh tingkat implementability dari kebijakan itu sendiri, mulai dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi, memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya, ada target yang hendak

ingin dicapai artinya sejauh mana perubahan yang diinginkan haruslah memiliki skala yang jelas, dan lain-lain hal yang menjadi keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. Regulasi penerapan belajar dari rumah juga tidak serta merta harus daring semua menurut dinas pendidikan dalam hal ini Kasubag Program bahwa mereka mempertimbangkan dari segi geografis sekolah, mereka juga memasukan dalam tiga tipologi daerah yang memungkinkan untuk belajar daring efektif, pertama ada yang namanya daerah Best Network, ke dua Bat Network dan yang ke tiga adalah Remot Area. Sedikit penulis jelaskan bahwa ke tiga pembagian daerah tersebut merupakan daerah yang akses jaringan internetnya baik sampai dengan daerah yang tidak dapat jaringan sama sekali.

Merujuk pada Bapak Kepala Sub Bagian Program, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan M. Yusri Gasali, mengatkan hal yang serupa dengan Bapak Dr. Idrus selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sistem daring ini mengacu pada kebijakan SKB 4 Menteri, dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Artinya apa, di maksimalkan setengah dari regulasi yang harus ada dan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada sekolahnya. Wawancara yang diperoleh dari Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (28 Juni 2021).

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, kedua jawaban informan diatas mengikuti alur yang telah dibuat dan linear pada aturan pemerintah pusat. Type of Benefits (manfaat) artinya ada sisi positif dari aturan untuk menekan penyebaran virus dan menghindarkan siswa-siswi beserta guru-guru dari tertularnya virus Covid-19. Sejauh ini proses yang ada dari tahap awal sampai ke dinas pendidikan masih linear meskipun kembali lagi mereka mereduksi sebelum dibuatkan Pergub dan juknisnya.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas, terkait Indikator Kesesuaian Proses menyatakan bahwa Kebijakan / ALUR Pembelajaran Sistem Daring yakni, aturan dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, kemudian dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan itu dibuatlah peraturan gubernur dan Juknisnya. Kemudian dibuatlah SOP nya bagaimana proses pembelajaran sistem daring yang diterapkan. Selanjutnya dari pihak dinas pendidikan kemudian mempertimbangkan dari segi geografis sekolah, juga melihat tiga tipologi daerah yang memungkinkan untuk belajar daring efektif, pertama ada yang namanya daerah Best Network, ke dua Bat Network dan yang ke tiga adalah Remot Area. Sedikit saya jelaskan bahwa ke tiga pembagian daerah tersebut merupakan daerah yang akses jaringan internetnya baik sampai dengan daerah yang tidak dapat jaringan sama sekali. Selanjutnya aturan penyesuaian proses pembelajaran daring dari pihak sekolah, guru mengikuti dan menyesuaikan aturan yang diberikan oleh dinas pendidikan, dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan hanya memberikan gambaran garis besarnya saja, kemudian guru-guru melaksanakan jadwal yang telah dibagikan oleh pihak kurikulum yang mana didalamnya sudah ada jadwal proses belajar.

Terkait Sistem belajar dan media belajar selama Covid-19, yakni kembali ke sekolah / satuan pendidikan masing-masing tetapi tidak terlepas dari penerapan intinya, yaitu Daring. Misalnya contoh penggunaan aplikasi media belajar, kementerian menggunakan aplikasi zoom dengan googlemeeting yang guru-guru gunakan dalam mengajar, tapi kalau siswa tidak sanggup, sekolah menggunakan mengajar aplikasi media belajar WhatsApp dan Goole Classroom. Penyesuaian proses pada siswa SMA Negeri 12 Makassar sudah terlaksana dengan baik diperoleh hasil bahwa mereka sebagai siswa mempunyai inisiatif untuk tetap mendukung kegiatan belajar daring. Untuk menyesuaikan diri dengan program pembelajar sistem daring ini cukup berat menurutnya, dikarenakan proses belajar secara daring muncul rasa malas terhadap dirinya, rata-rata dari keseluruhan jawaban siswi yang

sempat peneliti temui dan wawancarai mereka cukup berat untuk menyesuaikan aturan daring ini, tetapi mereka selalu mengikuti arahan dari guru untuk tetap dapat berperan aktif mengerjakan tugas yang telah diberikan.

Menurut (Grindle, 1980) dalam (Agustino, 2008), bahwa ketercapaian ini diukur dengan melihat dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Sistem pendidikan di Indonesia dialihkan ke metode pembelajaran daring atau online akibat wabah virus Covid-19. Pengalihan metode pembelajaran online menyebabkan terjadinya beberapa perubahan terhadap peserta didik. Salah satu dampak yang berpengaruh pada pembelajaran sistem daring terhadap siswa di SMA Negeri 12 Makassar kata Andi Aisyah Syahrani siswa SMA Negeri 12 Makassar;

Kurangnya materi yang diterima dengan baik, sistem penyajarannya juga dari guru ke siswa itu sangat terbatas, karena terhalangi oleh layar kaca. Bahkan kasihan ada siswa yang di dalam rumahnya hanya memiliki 1 handphone saja sedangkan yang belajar dari dalam rumahna ada 5 orang, pastinya sangat merasakan dampak dari pembelajaran sistem daring ini di masa pandemi. Wawancara yang diperoleh dari Andi Aisyah Syahrani siswa SMA Negeri 12 Makassar (23 Juli 2021).

Ada pula siswa yang mengatakan hal yang serupa kata Zhafira Nur Athiyyah S. Dampak yang saya rasakan lebih ke akademiknya, menurut saya pribadi akademiknya sedikit menurun, kurang konsentrasi karena setiap hari harus lihat handphone seperti bergantung oleh handphone karena mengontrol tugas yang masuk dari guru, kemudian belum lagi dari guru, ada beberapa guru cara menjelaskannya susah dipahami, beda dengan tatap muka jika dijelaskan secara langsung lebih paham. Dan susah lagi jika ingin bertanya dengan keterbatasan waktu juga. Jadi dampaknya lebih terasa banyak si di saya pribadi. Wawancara yang diperoleh dari Zhafira Nur Athiyyah S. siswa SMA Negeri 12 Makassar (23 Juli 2021).

Dari hasil wawancara di atas bersama informan yang peneliti dapatkan dilapangan, bahwa dampak positif dari belajar online ini tidak ada. dapat di generalisasi kalau ada efek yang membuat menurunnya pembelajaran siswa bukan dikarenakan sistem belajar daring akan tetapi lebih kepada perangkat pendukung pengaplikasian sistem belajar daring mulai dari, jaringan internet, smart android bagi guru dan siswa serta juknis penggunaan aplikasi belajar online yang sedikit saja yang paham. Kemudiann yang paling terdampak dalam hal ini adalah siswa dikarenakan singkat/keterbatasan waktu belajar.

Hasil wawancara penulis bersama informan pada SMA Negeri 12 Makassar yakni Ibu Roslia, S.Pd dan Ibu Aisyah Tarru, S.Pd selaku guru Mata Pelajaran Biologi;

Iya pasti ada dampaknya, dampak ini dulu dampak yang sangat berpengaruh sama anak-anak. Anak-anak susah sekali belajar, Anak-anak yang kurang mampu kasihan tidak pernahmi ikut, yg tidak mampu beli kuota, bemanami caranya, jadi kita cari yang ringannya saja, kita pakai WA saja dengan siswa baca/membaca. Wawancara yang diperoleh dari guru biologi SMA Negeri 12 Makassar (23 Juli 2021).

Hal serupa dikatakn Bapak Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd bahwa: Mungkin yang paling merasakan dampaknya adalah terhdap siswa. Siswa itu hasil belajar sepertinya kutang maximal kemudian materi yang bisa diserap juga kurang dari pembelajaran daring. Kemudian target materi dari guru juga kadang tidak bisa tercapai karena keterbatasan waktu, itu barang kali yang paling terasa dampaknya. Wawancara yang diperoleh dari Bapak Muhammad Arif selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 12 Makassar (05 Juli 2021).

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas, terkait sub indikator dampak atau efek pada indikator ketercapaian implemeentasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama informan bahwa dampak yang sangat dirasakan ada pada siswa-siswi yang dimana memberikan efek kemalasan terhadap minat belajarnya, kurangnya memahami. Kemudian guru-guru disekolah memakai aplikasi belajar yang dapat memudahkan siswa untuk memudahkan mengakses internetnya. Tidak efektifnya proses pembelajaran daring yang harus mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, yang dimana siswa memiliki pekerjaan untuk membantu biaya hidup dirinya untuk tetap bisa memiliki media belajar.

2) **Tingkat Perubahan yg terjadi dan Perubahan yang terjadi**

Menurut (Grindle, 1980), bahwa tujuan kebijakan tercapai diukur dengan melihat faktor tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Berikut hasil wawancara penulis bersama informan yakni Zhafira Nur Athiyyah. S selaku siswa pada SMA Negeri 12 Makassar;

Kalau menurut saya sih, kalau dari sistem belajar itu sedikit lebih termotivasi lagi, karena kan semua harus belajara sendiri-sendiri, jadi dalam pembelajaran itu saya lebih mandiri, tidak pernah lagi saling mengandalkan dengan seteman kelas.jadi perubahannya lebih mandiri mencari jawaban di youtube atau *google*. Wawancara yang diperoleh dari Zhafira Nur Athiyyah S. siswa SMA Negeri 12 Makassar (23 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis simpulkan, bahwa tingkat perubahan pada siswa dalam penerapan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi. Siswa lebih mandiri dalam belajar dan inisiatif sendiri dalam mencari pemahaman materi, sehingga siswa tidak lagi saling mengharapkan. Yangh sebelumnya sejak tatap muka siswa berkelompok-kelompok di dalam kelas sekarang di masa pandemi siswa lebih mandiri

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan kesimpulan penulis simpulkan hal ini rumusan masalah pertama, keberhasilan implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar, diperoleh hasil bahwa mereka sebagai siswa mempunyai inisiatif untuk tetap mendukung kegiatan belajar daring. Untuk menyesuaikan diri dengan program pembelajar sistem daring ini cukup berat menurutnya, dikarenakan proses belajar secara daring muncul rasa malas terhadap dirinya, rata-rata dari keseluruhan jawaban siswi yang sempat peneliti temui dan wawancarai mereka cukup berat untuk menyesuaikan aturan daring ini, tetapi mereka selalu mengikuti arahan dari guru untuk tetap dapat berperan aktif mengerjakan tugas yang telah diberikan. dapat di generalisasi kalau ada efek yang membuat menurunnya pembelajaran siswa bukan dikarenakan sistem belajar daring akan tetapi lebih kepada perangkat pendukung pengaplikasian sistem belajar daring mulai dari, jaringan internet, *smart android* bagi guru dan siswa serta juknis penggunaan aplikasi belajar online yang sedikit saja yang paham.

Kemudiann dalam mengukur dimensi ketercapaian dilihat dari yang paling terdampak dalam hal ini adalah siswa dikarenakan singkat/keterbatasan waktu belajar. dampak yang sangat dirasakan ada pada siswa-siswi yang dimana memberikan efek kemalasan terhadap minat belajarnya, kurangnya memahami. Kemudian guru-guru disekolah menggunakan aplikasi belajar yang dapat memudahkan siswa untuk memudahkan mengakses internetnya. Tidak efektifnya proses pembelajaran daring yang harus mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, yang dimana siswa memiliki pekerjaan untuk membantu biaya hidup dirinya untuk tetap bisa memiliki media belajar. Tingkat erubahan terhadap penerimaan kelompok sasaran sekolah memberikan sosialisasi mengenai *LMS*

terhadap guru pengajar dalam pengenalan aplikasi yang digunakan dalam metode pembelajaran dan media belajar siswa.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pembelajaran Sistem Daring

Menurut (Edward III dalam Subarsono 2011), bahwa keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Implementasi kebijakan ini ini bersifat *top down*. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dalam hasil dan pembahasan penelitian ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

a) Komunikasi

Menurut (Edward III dalam Agustino 2006), bahwa untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan maka harus mengerti betul apa yang harus dilakukan, selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Berikut kutipan wawancara yang saya lakukan Bersama M. Yusri Gasali sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, terkait bagaimana pemberian informasi yang diberikan ke sekolah untuk siswa mengenai penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19

Dari kami Dinas Pendidikan memiliki beberapa cabang dinas dan kita kami bagi menjadi XII Wilayah sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, untuk SMA Negeri 12 Makassar itu termasuk di Wilayah II Makassar-Gowa, nah dari situ kemudian kita menyampaika informasi dengan memberi surat edaran ke cabang dinas kemudian masuk ke sekolah-sekolah yang selanjutnya pihak sekolah yang punya wewenang untuk menyampaikan ke siswa-siswanya. Selanjutnya untuk kebijakannya itu tergantung bidang masing-masing karena ada disitu koordinator kurikulum, dia lihatmi kondisi di sekolahnya. Karena tidak semua anak-anak punya android, karena taraf ekonomi orang tuanya juga berbeda-beda tidak boleh disamakan. Artinya Kembali ke sekolah masing-masing karena tidak bisa juga kita tekanka bilang harus vicon (Video Conference). Kita saja kalau vicon sampai 1 jam bisa habis mi 4GB kuota. Orang tua belum tentu membiayai anaknya dengan pemakaian kuota banyak dalam tiap hari belajar. Wawancara yang diperoleh dari M. Yusri Gasali sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (28 Juni 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas penulis simpulkan bahwa penyaluran komunikasi yang diutarakan oleh Bapak M. Yusri Gasali selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan sudah terarah dan jelas, yang pada intinya informasi kebijakan penerapan pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 di serahkan ke sekolah masing-masing dengan melihat kondisi ekonomi siswa. Dalam teori Agustino komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor yang menjadika komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi antara lain, transmisi, kejelasan dan konsistensi. Ketiga dari indikator tersebut sudah terlihat jelas baik dari hasil wawancara saya Bersama Bapak M.Yusri Gasali bahwa informasi nya melalui perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya sekolah lah yang memiliki wewenang karena di dalamnya terdapat koordinator Kurikulum dan Kesiswaan.

b) Sumber Daya

Menurut (Edward III dalam Agustino 2006), bahwa selain informasi yang menjadikan kebijakan tercapai adalah sumber daya yang dimiliki implementato.

Sumberdaya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

Sumber Daya merupakan bagian yang sangat penting, dalam penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19. Bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu nilai potensi yang telah dimiliki oleh suatu unsur tertentu. Juga sebagai sesuatu yang dapat dipandang memiliki nilai ekonomi, dan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, insitusi dan perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia adalah orang yang berperan sebagai promotor, pemikir, dan perencana dalam suatu organisasi untuk mnecapai tujuan. Berikut hasil wawancara yang saya dapatkan bersama Bapak M. Yusri Gasali selaku Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan:

Untuk sumber daya manusia dari yang kurang paham terhadap IT misalnya guru, kita sesuaikan juga bagi yang kelahiran 1965 kebawah ituyakin saja susah paham untuk IT (Informasi Teknologi) yang 1970 – an ke atas itu sudah bisami mengfungsikan IT ibaratnya menjangkau mi tekolomunikasi. Kalau kelahiran 1965 kebawah kayaknya memang agak susah karena dia sudah hidup di zona nyaman sistem mengajarnya. Palingan bisa sedikit tapi aplikasi yang ringan seperti WhatsApp itu saja pasti didampingi sama anaknya di rumah. Jadi memang ini tantang untuk kita, tetapi secara tidak langsung dimaklumi saja. Kan sudah ada imbangan sudah ada yang paham dan mulai pintar mengfungsikan. Kalau sudah ada pengarahan dan mau belajar setidaknya mengurangi dari presentasi nya dan ada usaha. Jadi kita Kembali kalau kita tidak bisa melek semua setidaknya sudah adalah kita lakukan perubahan. Wawancara yang diperoleh dari Bapak M. Yusri Gasali selaku Kepala Sub Bagian Program, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (28 Juni 2021).

Maka kesimpulan dari indikator Sumber daya menyatakan bahwa, melihat kondisi sumber daya manusia dan kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Para siswa mendapatkan beberapa kendala yang dimana isi kuota data yang terbtas kemudian penyampaian materi yang diberikan guru tidk sampai pada pemahaman siswa sehingga beberapa siswa sangat merasakan turunnya semangat belajarnya dan menimbulkan efek malas. Jika hanya pembelajaran daring yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang seadanya. Siswa keluhkan kan guru hanya mengirim materi namun dalam kompetesi untuk menjelaskan masih belum mencapai maksimal. Hal itu dikarenakan isi kuota data yang terbatas, media pembelajaran yang minim pemahaman dam mengfungsikan aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran daring yang baik. Tentunya dalam hal ini sumber daya yang dimiliki oleh implementator, yakni sumber daya pendukung yaitu sumber daya manusia, dan kompetensi implementator dan sumber daya finansial yang dihasilkan oleh pelaksana bisa menjadikan kebijakan tersebut akan tercapai sesuai yang diharapkan.

c) Disposisi

Menurut (Edward III dalam Agustino 2006), bahwa disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanay harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hasil wawancara yang penulis lakukan bersmaa bapak M. Yusri Gasali Kepala Sub Bagian Program pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan:

Belum terlalu efektif dek, karena ditemuannya guru-guru biasa siswa sementara Vicon banyak pakai Recording, maksudnya merekam gerkan-gerakan di tampilannya padahal siswa Hanphone nya di simpan saja dan siswa tersebut tidur/ jalan-jalan. Jadi seolah-olah

ada depan layar ternyata itu hanya tampilan rekaman, padahal guru tahu pada saat disebut amanya namun tidak menjawab. Jadi tidak efektif dek karena kami juga kalau ada pengarahan dari kementerian Vicon begitu tidak terlalu efektif juga. Konsentrasi terbagi menjadi 2. Tidak efektif bukan kebijakannya, tapi kita tidak siap melakukan pekerjaan 2 sekaligus. Sedangkan daya tangkap cuman satu jadi disitu kurangnya Vicon. apa lagi anak-anak dir rumah sementara belajar disuruh orang tunya. Belajar sambil masak juga untuk orang di rumahm kan itu kendala-kendalanya, ada juga siswa kerja separuh waktu disitu juga kendalanya. Jadi kita tidak bisa terlalu menekankan bahwa ingin begini karena jangan sampai ada siswa juga kerja untuk sekolahnya. Wawancara yang diperoleh dari M. Yusri Gasali sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (28 Juni 2021).

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas, terkait Indikator Disposisi menyatakan bahwa, tak sedikit yang menjawab bahwa pembelajaran sistem daring itu berjalan efektif. Tetapi ada juga yang menjawab kalau pembelajran daring bisa efisien karen bisa belajar dimana saja. Dan bisa menghindari kerumunan karena masih di masa pandemi covid-19. Namun sikap dan karakteristik siwaa yang berpengaruh besar terhadap permasalahan yang timbul selama proses pemebelajaran sistem daring. Diperoleh hasil siswa kurang memahami materi karen guru yang sudah berumur untuk menyampaikan materi lebih kurang dipahami dikarenakan media dan aplikasi belajar yang terbatas.

d) Struktur Birokrasi

Menurut (Edward III dalam Agusrtino 2006), bahwa struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Berikut hasil wawancara penulis bersama Bapak M. Yusri Gasali selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan;

Kami punya perpanjangan tangan di wilayah masing-masing. Jadi stukturnya dari sekretariat itu diarahkan ke Kebijakannya tergantung bidang masing-masing karena ada disitu kordinator kurikulum, jadi dia lihat juga geografisnya, kembali ke geografisnya sekolah, tempatnya sekolah masing-masing. Karena tidak semua anak-anak itu punya android. Kemudian di lanjutkan kalau kita design nya di sini, Kita lihat dulu aturan dari permendikbud, dari permendikbud itu kita buatlah Pergub dan Juknisnya. Jadi, Susunannya itu dari Permendagri kemudian dibuatlah dalam bentuk Pergub, pergub itu dibuatlah SOP nya. Bagaimana pembelajaran di masa Covid-19. Wawancara yang diperoleh dari M. Yusri Gasali sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (28 Juni 2021).

Maka hasil kesimpulan wawancara yang diperoleh dari indikator Struktur Birokrasi menyatakan bahwa kebijakan program pemebelajaran sistem daring, tidak saja membutuhkan dukungan dari masyarakat sasaran kebijakan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana tingkat responsivitas pemerintah dan aparaturnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan belajar daring. Dalam perspektif ini tingkat responsivitas pemerintah dapat dilihat dari daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan guru dan masyarakat, kemampuan aparaturnya dalam mengenali kebutuhan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh tahapan regulasi yang dibuat.

Berikut ini ditunjukkan konsistensi disdik sulsel dalam mendukung pelaksanaan sistem belajar daring. Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang didukung oleh data dan dokumen yang relevan dapat ditegaskan bahwa responsivitas atau daya tanggap terhadap implementasi kebijakan penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan

kepentingan masyarakat dalam menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat. Kemudian SMA Negeri 12 Makassar dalam pengeimplementasiannya tidak terlepas dari aturan pusat namun tetap mempertimbangkan antara regulasi-regulasi yang ada dan tingkat ekonomi peserta didik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan kesimpulan penulis simpulkan hal ini rumusan masalah pertama, keberhasilan implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar, diperoleh hasil bahwa mereka sebagai siswa mempunyai inisiatif untuk tetap mendukung kegiatan belajar daring. Untuk menyesuaikan diri dengan program pembelajar sistem daring ini cukup berat menurutnya, dikarenakan proses belajar secara daring muncul rasa malas terhadap dirinya, rata-rata dari keseluruhan jawaban siswa yang sempat peneliti temui dan wawancarai mereka cukup berat untuk menyesuaikan aturan daring ini, tetapi mereka selalu mengikuti arahan dari guru untuk tetap dapat berperan aktif mengerjakan tugas yang telah diberikan. dapat di generalisasi kalau ada efek yang membuat menurunnya pembelajaran siswa bukan dikarenakan sistem belajar daring akan tetapi lebih kepada perangkat pendukung pengaplikasian sistem belajar daring mulai dari, jaringan internet, smart android bagi guru dan siswa serta juknis penggunaan aplikasi belajar online yang sedikit saja yang paham.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang didukung oleh data dan dokumen yang relevan dapat ditegaskan bahwa responsivitas atau daya tanggap terhadap implementasi kebijakan penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat. Kemudian SMA Negeri 12 Makassar dalam pengeimplementasiannya tidak terlepas dari aturan pusat namun tetap mempertimbangkan antara regulasi-regulasi yang ada dan tingkat ekonomi peserta didik. Guru mampu memperoleh penerapan pembelajaran sistem daring di masa pandemi covid-19 dengan pemahaman materi yang bisa siswa pahami dengan baik. Walau tidak mampu untuk maksimal setidaknya struktur organisasi berjalan dengan semestinya. ditunjukkan konsistensi disdik sulsel dalam mendukung pelaksanaan sistem belajar daring serta para guru dan siswa SMA Negeri 12 Makassar. keempat indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan dan saling memengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhetya Cahyani, dkk. 2020. Motivasi Belajar Siswa SMA Pada Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19. Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. DOI: <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.57>. Diakses Pada 23 Maret 2021.
- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Amir Nur Rahmat. 2020. "Sekolah di Sulsel Belum Penuhi Protokol Kesehatan, Belajar Daring Berlanjut". (sulawesi.bisnis.com).
- Dr. Arifin Tahir., M.Si. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi. Bandung: Alfabeta, cv.
- Fathin Robbi Sukma. 2020. "Pendidikan dan Permasalahan Pelajar di Masa Pandemi". (ibtimes.id). https://www.researchgate.net/publication/340453108_artikel_kurang_efektifnya_pembelajaran_daring_madeputra
- Iras Aprilia. 2020. "Belajar "Online" Tak Semudah yang Dibayangkan". (detikNews.com)
- Ismi Fahrurnisah Rambe. 2020. Implementasi Pembelajaran Biologi Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di MAN 1 Mandailing Natal. Sumatra Utara Medan : Univeritas Islam Negri. <http://repository.uinsu.ac.id/9776/>. Diakses Pada 11 Februari 2021.
- John W. Santrock. 2003. Perkembangan Pendidikan. Jakarta: Erlangga.

- Luthfia Ayu Azanella. 2020. “9 Daerah di Indonesia yang Terapkan PSBB Karena Virus Corona”. (Kompas.com).
- Made Putra. 2020. Kurang Efisiennya Pembelajaran Daring/E-Learning.
- Mardianto Prabowo. 2020. Persepsi Siswa Kelas XII Terhadap Pembelajaran Daring Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMAN 1 Bintang Timur Provinsi Kepulauan Riau. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/69084/>. Diakses Pada 2 Februari 2021.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat CoronaVirus(COVID-19).
- Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Niken Widya Yunita. 2020. “Penyebab, Asal, Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia”. (detik.com).
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB Pedoman Pelaksanaan PSBB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka percepatan pengolahan COVID-19.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Terkait COVID-19.
- Prof. Budi Winarno, MA. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Buku Kita.
- Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta, cv.
- Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD. 2008. Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus). Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran MENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Dises (COVID- 1 9). Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 24 Maret 2020.
- Syarifuddin, A. S. (2020). Implementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distencing. Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 5(1), 31–34.
- Syarifudin, Albitar S. 2020. Implementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya SocialDistancing. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal 31-33.<https://journal.trunojoyo.ac.id/metalingua/article/view/7072>
- Syarifudin. 2017. Pengembangan Sistem Pembelajaran Online di SMK NU Unggaran. Hal 19. Semarang: Universitas Negri Semarang.<https://lib.unnes.ac.id/29554/1/1102413046.pdf>. Diakses Pada 10 Februari 2021.
- Wahab, A. (2008). Analisis Kebijakan. PT. Bumi Aksara.
- Wajyu Aji Fatma Dewi. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. University Of Pahlawan Tuanku Tambusai. DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Zaharah Anissa Windarti Galia Ildusovna Kirilova, “Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities In Indonesia,” 2020, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 07, no. 03 (t.t): 269–82, 272, 279 dan 280. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15104>